

BAB III

DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1901-1922

Kehidupan sosial adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia yang tampak pada bentuk perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari. Dinamika sosial ini sebagai perubahan sosial di dalam masyarakat akibat dari berbagai faktor pendukung perubahan di masyarakat seperti faktor ekonomi, budaya dan Politik yang mengalami berbagai bentuk permasalahan, permasalahan inilah bisa dalam bentuk kelompok ataupun perorangan.

Dinamika sosial dalam pembahasan Bab ini tidak hanya membahas arti dinamika yang mendefinisikan dinamika sebagai sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.³⁸ Dalam pengertian lainnya dinamika sosial berarti gerakan masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi dalam bukunya A. Rusdiana menjelaskan dinamika sosial harus memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu dan menekankan peran umpan balik.³⁹

Peneliti berdasarkan konsep dinamika sosial di atas menarik kesimpulan bahwa dinamika tidak hanya berarti bagaimana kehidupan sosial naik turun akan tetapi dinamika sosial mengartikan atau menjelaskan adanya perubahan,

³⁸ Rahmi Widyanti, *Perilaku Organisasi (Teori Dan Konsep) Jilid 1*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 2019, hlm 65.

³⁹ A Rusdiana, *Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm 185.

berkembang dan bergerak dari waktu ke waktu di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.

Pembahasan bab ini peneliti akan menggunakan indikator kehidupan sosial. Indikator kehidupan sosial sangat banyak menurut para ahli. Akan tetapi peneliti di pembahasan Bab III ini akan menggunakan indikator sosial yang di cetuskan oleh Linton. Linton menetapkan kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator yaitu: umur dan kelamin, pekerjaan, prestise, famili atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok perserikatan.⁴⁰

Berdasarkan indikator kehidupan sosial masyarakat menurut Linton, dalam pembahasan keadaan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Majalengka peneliti akan membaginya ke dalam beberapa pembahasan. Pembahasan tersebut yaitu, indikator pertama yaitu umur dan kelamin serta famili atau kelompok rumah tangga akan masuk di pembahasan mengenai Demografi dan struktur masyarakat di Kabupaten Majalengka. Indikator pekerjaan dan prestise akan masuk di pembahasan mengenai perkembangan kesempatan kerja dan upah pekerja serta kemiskinan masyarakat. Indikator keanggotaan dalam kelompok perserikatan akan masuk di pembahasan mengenai perkembangan pendidikan serta munculnya gerakan pembaharuan.

⁴⁰ Siti Basrowi dan Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 7, No. 1 (2010): hlm 58–81

3.1 Demografi dan Struktur Masyarakat di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Demografi adalah suatu ilmu yang membahas tentang persoalan dan keadaan penduduk di suatu wilayah, berupa kematian, kelahiran, migrasi, kondisi perekonomian, komposisi penduduk, dan sebagainya. Data tentang Demografi yang menjelaskan atau menggambarkan masyarakat dan wilayah Kabupaten Majalengka sangat sedikit. Tidak banyak sumber-sumber kolonial yang menjelaskan keadaan tersebut. Akan tetapi tidak mematahkan peneliti untuk mencari sumber-sumber yang berhubungan tentang hal tersebut. Peneliti dalam membahas mengenai demografi mendapatkan sumber dari dokumen *Koloniaal Verslag* dan buku karya Jan Breman.

3.1.1 Perkembangan Penduduk Pribumi di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Memasuki abad ke-20 jumlah penduduk Kabupaten mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 1894 yang berjumlah 274.741 jiwa,⁴¹ meningkat pada tahun 1905, yaitu sekitar 37.698 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan data informasi yang peneliti himpun dari *Koloniaal Verslag Van [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A* hlm 10, berjumlah 312.439 jiwa. Distrik Talaga menjadi wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 79.813 jiwa dan wilayah dengan jumlah

⁴¹ Perubahan penduduk di Kabupaten Majalengka pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk di daerah tersebut. Lihat: N. Kartika, *op.cit*, hlm 80.

penduduk paling sedikit adalah wilayah Maja dengan jumlah penduduk sebanyak 37.771 jiwa.⁴²

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Pribumi di Kabupaten Majalengka Tahun 1905

Distrik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Majalengka	29.658	32.384	62.042
Rajagaluh	29.008	31.224	60.232
Jatiwangi	35.028	37.553	72.581
Maja	18.156	19.615	37.771
Talaga	38.661	41.152	79.813
Total	150.511	161.928	312.439

Sumber: Diolah dari Koloniaal Verslag Van .⁴³

Jumlah pendudukan di Kabupaten Majalengka pada tahun 1905 didominasi oleh Perempuan dengan jumlah 161.928 jiwa. Jumlah tersebut memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah penduduk Laki-Laki yang berjumlah 150.511 jiwa. Lebih dari 11 ribu jiwa selisih antara penduduk Perempuan dan Laki-Laki.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka pada awal ke-20 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dilihat dan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1894 atau akhir abad ke-19. Hal ini dilihat dari survei jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 1918 yang berjumlah 327.250 jiwa. Jumlah peningkatan penduduk Kabupaten Majalengka meningkat dari survei terakhir pada tahun 1905 ke 1918, meningkat sebanyak 14.811 jiwa. Untuk lebih lengkapnya mengenai data penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 1918, pada tabel di bawah ini:

⁴² Koloniaal Verslag Van 1907 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage A, hlm 10-11. Tentang Statistik Penduduk, Peternakan Dan Jumlah Kendaraan Di India Belanda, Menurut Hasil Rekaman Lima Tahun Keenam Yang Terjadi Pada Tahun 1905.

⁴³ Koloniaal Verslag Van 1907 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage A, hlm 10-11.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Pribumi di Kabupaten Majalengka Tahun 1918

No	Nama Distrik	Jumlah
1	Majalengka	72.500
2	Talaga	112.500
3	Rajagaluh	62.250
4	Jatiwangi	80.000
Jumlah		327.250

Sumber: Diolah dari Jan Breman.⁴⁴

Pada survei tahun 1918 peningkatan jumlah terbanyak terjadi di wilayah Talaga dengan peningkatan penduduk 32.687 jiwa peningkatan tersebut diakibatkan penggabungan survei penduduk wilayah Maja bergabung ke wilayah Talaga Talaga. Peningkatan Jumlah terbesar kedua adalah wilayah Majalengka dengan peningkatan penduduk sebesar 10.458 jiwa menjadi 72.500 jiwa dari survei tahun 1905. Untuk peningkatan penduduk Jatiwangi dan Rajagaluh, peningkatan penduduk di bawah 10 ribu jiwa dengan Peningkatan wilayah Jatiwangi sebesar 7.149 jiwa dan wilayah Rajagaluh sebesar 2.018.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Pribumi di Karesidenan Cirebon Tahun 1920

Afdeling Cirebon		Afdeling Indramyu		Afdeling Majalengka	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
452.324	472.413	194.889	200.700	178.788	185.978
924.787		395.609		359.766	

Sumber: Diolah dari *Koloniaal Verslag*.⁴⁵

⁴⁴ Jan Breman, *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja*. Jakarta: LP3ES, 1986, hlm 65. Di olah dari Buku Kort Economics Overzicht Van De Districten In De Residentie Cheribon (Na Afloop Der 1ste Tienjaarlijksche Herziening In 1919), Jaaverslag Van Den Topograpischen In Nederlandch Indie.

⁴⁵ *Koloniaal Verslag Van 1923 [Nederlandes (Oost-) Indie. Bijlage A*, hlm 2. *Koloniaal Verslag Van 1923 [Nederlandes (Oost-) Indie. Bijlage A*, n.d.

Pada tahun 1920 jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka masih di dominasi oleh para Perempuan dengan jumlah penduduk Perempuan yaitu 185.978 jiwa dan untuk Laki-Laki 178.788. Akan tetapi perbedaan jumlah Perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda sekitar 7 ribu jiwa selisih antara laki-laki dan Perempuan, hal ini berbeda dengan survei penduduk tahun 1905 yang berselisih sekitar 11 ribu jiwa. Perbedaan selisih tersebut karena pertumbuhan yang berjenis laki-laki lebih banyak dibandingkan yang berjumlah Perempuan. Dari tahun 1905 pertumbuhan yang berjenis kelamin laki-laki selama 15 tahun sampai tahun 1920 meningkat sebesar 28.277 jiwa, sedangkan Perempuan peningkatannya lebih rendah sebesar 24.050 jiwa. Hal tersebut bisa di sebabkan meningkatnya jumlah penduduk laki-laki karena banyak pendatang laki-laki di Kabupaten Majalengka untuk bekerja sebagai buruh dan lainnya. Sebab selanjutnya adalah banyak orang tua yang lebih menginginkan anaknya berjenis kelamin laki-laki, hal tersebut karena untuk laki-laki lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan (Budaya Patriarki).

Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan pada survei 1920 yaitu 359.766 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka menjadi terbesar kedua setelah jumlah penduduk Cirebon. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka pada survei tahun 1920 ini meningkat sebesar 32.516 jiwa dari survei 2 tahun sebelumnya yaitu dari tahun 1918. Lonjakan penduduk di Kabupaten Majalengka selama dua tahun disebabkan mulai berkembangnya geliat ekonomi pasca menurunnya perekonomian di Kabupaten Majalengka yang ditandainya tidak adanya peningkatan upah pekerja di Kabupaten Majalengka pada

tahun 1914 sampai 1916. Pasca tahun 1917 terjadilah peningkatan upah di Kabupaten Majalengka, sehingga dari tahun 1918 ke 1920 terjadilah gelombang pendatang masuk ke wilayah Kabupaten Majalengka.⁴⁶

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang meningkat dari tahun 1905 sampai 1920 sebesar 47.327 jiwa. dapat dilihat sebagai dampak dari perubahan bentuk mode produksi masyarakat tradisional subsisten menuju bentuk masyarakat industrialis modern. Hal ini dapat dilihat juga dari faktor pengaruh yang terjadi di Kabupaten Majalengka seperti berkembangnya perkebunan tebu, adanya pabrik gula, tersambungny transportasi ke kota Cirebon menggunakan kereta api dan perubahan metode pertanian tradisional ke modern. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka.

Berkembangnya perkebunan tebu dan pabrik gula yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka memberikan efek domino terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka. Di samping adanya perubahan masyarakat tradisional subsisten menuju bentuk masyarakat industrialis modern. Faktor lain dari peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan baru di luar masyarakat bertani. Dengan adanya perkebunan tebu dan pabrik gula memberikan terbukanya pekerjaan di wilayah Kabupaten Majalengka, sehingga banyak orang dari luar dari daerah Kabupaten Majalengka datang ke Kabupaten Majalengka hingga menetap untuk bekerja di wilayah Kabupaten Majalengka.

⁴⁶ *Koloniaal Verslag Van 1923 [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A*, hlm 2. Tentang Hasil sensus penduduk Hindia Belanda tahun 1920 (kekuatan penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk).

Peningkatan penduduk di Kabupaten Majalengka disebabkan oleh adanya aktivitas perekonomian yang semakin tinggi, sehingga banyak orang dari luar daerah Majalengka untuk tinggal dan menetap. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kabupaten Majalengka ini memberikan dampak terhadap perkembangan fisik Kabupaten Majalengka yaitu adanya peningkatan tempat tinggal, pekerjaan, dan transportasi serta industri-industri baru bermunculan.

3.1.2 Perkembangan Penduduk Non-Pribumi di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Keberagaman penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Majalengka sudah ada sejak abad ke-19. Penduduk non-pribumi yang tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka di pengaruhi oleh kedatangan pemerintah Hindia-Belanda, yang melakukan eksploitasi dan membangun infrastruktur untuk menunjang mobilitas penduduk. Para orang non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka mereka kebanyakan bekerja di kantor instansi pemerintahan, pemilik perkebunan dan menjadi pedagang. Penduduk Non-pribumi yang tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka beragam, seperti dari Eropa, Cina, Arab, Melayu dan lain-lain.

Memasuki abad ke-20, penduduk non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Jumlah penduduk non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka pada tahun 1905 sebesar 2.798 jiwa atau 0,4% dari total penduduk non-pribumi yang tinggal di pulau Jawa-Madura,⁴⁷ hal ini berdasarkan

⁴⁷ Pieter Creutzberg and J. T. M. Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1987, hlm 32.

survei yang tercantum di *Koloniaal Verslag Van [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A* hlm 10, etnis Cina masih menjadi penduduk non-pribumi terbanyak sebesar 2.625 jiwa, disusul Eropa berjumlah 113 dan timur asing sebesar 60 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka di pengaruhi berbagai hal.⁴⁸ Undang-undang agraria 1870 yang menyebabkan banyaknya investor dari orang non-pribumi yang menanam modal di Kabupaten Majalengka dan kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20. Jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Non-Pribumi di Kabupaten Majalengka Tahun 1905

Wilayah	Eropa		Cina		Timur Asing		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Majalengka	36	9	303	279	34	25	686
Rajagaluh	17	9	177	180	-	-	383
Jatiwangi	23	11	367	275	1	-	677
Maja	2	2	80	66	-	-	150
Talaga	3	1	455	443	-	-	902
Jumlah	81	32	1.382	1.243	35	25	2.798
Total	113		2.625		60		2.798

Sumber: Diolah dari *Koloniaal Verslag*.⁴⁹

Berbeda dengan jumlah penduduk pribumi yang di dominasi oleh Perempuan, penduduk non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka di dominasi oleh pria. Seperti, pada jumlah penduduk orang Eropa yang tinggal di Kabupaten Majalengka 70% di dominasi oleh Laki-laki dengan jumlah total 81 jiwa

⁴⁸ *Koloniaal Verslag Van 1907 [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A.*

⁴⁹ *Koloniaal Verslag Van 1907 [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A..*

dari total 113 jiwa dan sisanya adalah Perempuan. Sedangkan untuk orang Cina jumlah laki-laki adalah 52% dari jumlah total penduduk Cina dan untuk Perempuannya sekitar 47%. Dan untuk Timur Asing jumlah laki-laki nya adalah 58% dan untuk Perempuannya sekitar 41%. Banyaknya laki-laki yang tinggal di Kabupaten Majalengka disebabkan yang datang dan tinggal adalah para bujangan yang tidak memiliki istri atau yang sudah memiliki istri seringkali tidak dibawa ke tanah Hindia-Belanda. Fenomena ini akan sejalan dengan munculnya prostitusi dan kawin silang antara pribumi dan orang Eropa. Akan tetapi di wilayah Kabupaten Majalengka peneliti tidak menemukan data tempat prostitusi yang berkembang seperti di wilayah Bandung atau yang lainnya.

Berdasarkan data penduduk non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka, wilayah Majalengka menjadi wilayah yang banyak di tinggali oleh orang Eropa, hal ini karena wilayah Majalengka merupakan pusat Kabupaten Majalengka dan menjadi pusat pemerintahan Hindia-Belanda. Kemudian untuk Cina banyak mendiami di wilayah Talaga hal tersebut karena orang Cina banyak yang mengelola perkebunan teh di wilayah tersebut. Wilayah Jatiwangi dan Rajagaluh, orang non-pribumi tinggal di wilayah tersebut untuk bekerja dan mengelola perkebunan dan pabrik gula.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Non-Pribumi di Karesidenan Cirebon Tahun 1920

Afdeling Cirebon	Afdeling Indramyu	Afdeling Majalengka
22.185	6.307	3.174

Sumber: Diolah dari *Koloniaal Verslag*.⁵⁰

⁵⁰ *Koloniaal Verslag Van 1923 [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage A.*

Pada survei tahun 1920 Kabupaten Majalengka menjadi wilayah di Keresidenan Cirebon dengan jumlah penduduk non-pribumi paling sedikit jauh dari jumlah penduduk non-pribumi di wilayah Indramayu dan Cirebon. Jumlah penduduk non-pribumi di Kabupaten Majalengka adalah sebesar 3.174 jiwa meningkat sebesar 916 jiwa dari survei 1905.⁵¹ Jika dilihat dari total penduduk non-pribumi yang tinggal di Jawa-Madura jumlah tersebut mengalami penurunan 0,1% yaitu 0,3%. Jumlah yang sedikit penduduk non-pribumi di Kabupaten Majalengka disebabkan oleh Kabupaten Majalengka bukanlah wilayah pelabuhan ataupun perdagangan utama di keresidenan Cirebon. Berbeda dengan wilayah Cirebon yang merupakan wilayah pusat perekonomian di keresidenan Cirebon dan wilayah Indramayu yang terletak di jalur perdagangan Cirebon dengan Karawang dan Batavia serta memiliki pelabuhan perikanan.

Banyaknya orang non-pribumi yang tinggal di Kabupaten Majalengka juga disebabkan karena banyaknya aktivitas perekonomian dalam bidang perindustrian dan perkebunan, perindustrian dan perkebunan ini saling keterkaitan yaitu industri gula. Adanya aktivitas perekonomian yang semakin tinggi di wilayah Kabupaten Majalengka, memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah penduduk non-pribumi yang tinggal Kabupaten Majalengka. Sehingga menyebabkan banyak orang non-pribumi yang datang dan menetap di antaranya orang Eropa, Cina dan Timur Asing.

⁵¹ *Koloniaal Verslag Van 1923 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage A.*

3.1.3 Struktur dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Perkembangan suatu wilayah Kabupaten pada bidang ekonomi memberikan dampak terhadap hubungan sosial masyarakat. Perkembangan tersebut memberikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat wilayah tersebut. Perubahan tersebut bergantung letak geografis dan kehidupan ekonomi masyarakat wilayah tersebut. Seperti wilayah yang terletak di dataran tinggi dengan yang terletak di dekat pantai berbeda dan yang ekonomi masyarakatnya sebagai petani dengan masyarakatnya sebagai pelaut ataupun industri.

Kabupaten Majalengka ketika akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi perubahan bentuk mode produksi masyarakat tradisional subsisten menuju bentuk masyarakat industrialis modern. Hal tersebut mempengaruhi bagaimana keadaan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Pengaruh tersebut salah satunya berdampak terhadap struktur masyarakat Kabupaten Majalengka yang beragam. Keberagaman tersebut dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu, Pribumi, Eropa, Cina dan Arab-Melayu.

Struktur masyarakat yang ada di Kabupaten Majalengka terhadap perkembangan jumlah penduduk yang meningkat pesat ketika awal abad ke-20 yang meningkat hampir dua kali lipat dari abad ke-19. Struktur masyarakat di Kabupaten Majalengka ini terdiri dari Pribumi, Orang Eropa, orang Cina dan Arab-Melayu. Perbedaan golongan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda ini memberikan dampak-dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Melihat tabel jumlah penduduk pribumi dan non-pribumi

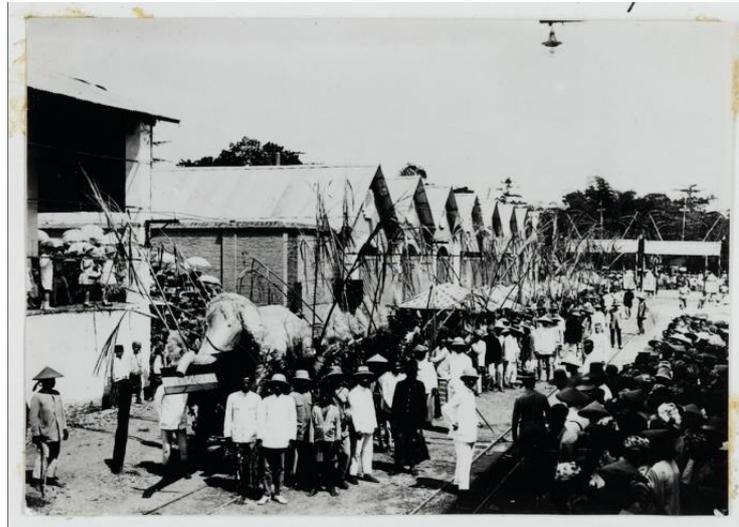
di Kabupaten Majalengka pada pembahasan sebelumnya, orang pribumi mendominasi jumlah, diikuti Cina, kemudian Eropa dan sisanya dari etnis lain.⁵²

Perbedaan letak permukiman dan upah pekerja menjadi masalah dari struktur masyarakat Kabupaten Majalengka. Misalnya permukiman orang Eropa ini terletak jauh dari permukiman pribumi, dipisahkan oleh permukiman orang Cina ataupun etnis lainnya. Orang-orang Eropa yang tinggal di Kabupaten Majalengka ini mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah dan pemilik perkebunan ataupun pabrik gula. Orang-orang Cina dan etnis lainnya seperti Arab, mereka tinggal di Kabupaten Majalengka ini untuk menjadi pedagang atau pengepul hasil pertanian dan bekerja sebagai mandor dan kuli di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Keberadaan rumah pejabat tinggi perkebunan dan para pegawai pemerintahan dari Eropa tersebut membawa budaya dari tanah asalnya ke daerah yang memiliki budaya lokal setempat, yang tidak mudah mereka terima. Bahkan mereka beranggapan bahwa budaya lokal (asli) adalah inferior dibandingkan dengan budaya mereka yang superior. Hal ini menyebabkan terjadinya pertentangan antara dua budaya atau oposisi biner antara budaya Barat dan budaya Timur. Keadaan ini juga menunjukkan adanya akulturasi dan asimilasi budaya, baik secara material maupun immaterial, maka interaksi antara lingkungan. Contoh dari asimilasi dan akulturasi tersebut adalah festival yang disebut “Badirian” yang diselenggarakan oleh pabrik gula di Kabupaten Majalengka.⁵³

⁵² N. Kartika, *op.cit.*, hlm. 81

⁵³ Circa, “Optocht Bij Het Maalfeest van Suikerfabriek Kadhipaten Ten Noorden van Madjalengka - KITLV18372,” *Digitalcollections.UniversiteitLeiden.NL*, last modified 1920, <https://digitalcollections.universiteitLeiden.nl/view/item/781904>. Di akses tanggal 09 Maret 2023



Gambar 3.1 Festival Badiran Yang Diselenggarakan Oleh Pabrik Gula Kadipaten

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/781904>

Festival Badiran (Dapat dilihat pada gambar 3.1) yang diselenggarakan oleh pabrik gula Kadipaten adalah salah satu cara Pabrik Gula mengkonsolidasi tenaga kerja untuk tetap bergantung pada pabrik. Festival tersebut mencampurkan budaya yang sudah ada sebelumnya seperti mapag sri dengan budaya festival yang dari orang Eropa, sehingga terbentuklah kebudayaan baru. Komplek-komplek pemakaman terjadinya diskriminasi yaitu dipisahkannya setiap pemakaman di Kabupaten Majalengka, seperti pemakaman orang Cina, pribumi dan Eropa yang terpisah. Serta adanya peraturan-peraturan untuk pemakaman orang cina oleh pemerintah Belanda, hal ini merugikan orang Cina dan menguntungkan pemerintah.

3.2 Perkembangan Kesempatan Kerja dan Upah Kerja di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Buruh atau pekerja merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja (Kontrak atau Perjanjian), pekerja tersebut bekerja di bawah perintah pemberi kerja (Perusahaan,

perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya). Buruh atau Pekerja atas jasanya dalam melakukan kerja yang bersangkutan dapat menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebutan buruh pada masa Hindia Belanda digunakan untuk orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan tangan atau melakukan pekerjaan kasar seperti: kuli, tukang, mandor dan lain-lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah *blue collar*. Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang memiliki pangkat belanda dinamakan pegawai dan diberikan kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah *white collar*.⁵⁴

Kesempatan pekerjaan di Kabupaten Majalengka di bidang perkebunan sangat tinggi, seperti yang akan di jelaskan pada bab IV. Meskipun begitu kesempatan kerja di wilayah Kabupaten Majalengka harus berebut dengan orang-orang pendatang, seperti Cina dan luar daerah Kabupaten Majalengka. Memasuki tahun 1900 ketika situasi pertanian yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka, maka dorongan tersebut menjadi perubahan sosial-ekonomi. Perubahan tersebut adanya perkembangan pekerjaan baru di luar sektor pertanian.

Perubahan sosial-ekonomi yang muncul dan berkembang di Kabupaten Majalengka, memberikan perubahan-perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Seperti masuknya pemodal-pemodal yang membuka perkebunan dan pabrik serta lahirnya sistem pertanian yang baru pada di awal abad ke-20, memunculkan kegiatan perekonomian baru seperti pembuatan Genteng-Batu

⁵⁴ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm 12.

bata, pedati, kayu, keranjang bambu, kayu bangunan dan kebutuhan sehari-hari para pegawai pabrik. Pertanian masyarakat Kabupaten Majalengka yang berfokus pada sektor subsisten akibat dari sistem tanam paksa. Masyarakat yang bekerja di sektor di luar pertanian cukup tumbuh dan berkembang.⁵⁵



Gambar 3.2 Pengrajian Keranjang Bambu Untuk Tempat Panen Tanaman Tebu Ketika Sedang Menjajakan Jualannya

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/928965>

Masuknya pemodal-pemodal Eropa di wilayah Kabupaten Majalengka memberikan dampak dalam berkembangnya sektor non pertanian. Hal ini menurut Soegijanto Padmo berdasarkan data yang ditemukannya di Kabupaten Majalengka masyarakat bergantung pada sektor non-pertanian sebanyak 4000 jiwa. Data tersebut berbanding lurus dengan data dari *Mindere Welvaart Commissie* industri lokal non-pertanian di Kabupaten Majalengka telah tumbuh dengan skala modal

⁵⁵ Yulian Firmansyah, "Inventarisasi Industri Bumiputera Di Majalengka Tahun 1904-1914: Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula Dan Identitas Ekonomi Lokal. *Majasono*. Vol 2, No. 2, hlm 15"

dan pendapatan yang berbeda. Perkembangan di sektor pertanian semakin berkembang ketika awal abad ke-20, akibat dari golongan pribumi kalah saing oleh pemodal eropa. Sehingga masyarakat golongan pribumi membuka pekerjaan di luar sektor pertanian.⁵⁶



Gambar 3.3 Pribumi yang menjadi Kuli di Perkebunan Tebu di wilayah pabrik gula Kadipaten

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/930924>

Pembukaan kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan Perkebunan, Pabrik Gula, perseorangan dan lainnya di Kabupaten Majalengka tidak menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi. Upah yang diterima masyarakat Kabupaten Majalengka tidak setara dengan tenaga yang mereka keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah tenaga kerja yang bermasalah di Kabupaten Majalengka terletak pada mereka yang bekerja menjadi buruh atau pekerja kasar. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai mandor pada perusahaan swasta mendapatkan upah yang sangat tinggi. Upah yang diterima para mandor yang

⁵⁶ Soegijanto Padmo, "Perkembangan Kesempatan Kerja Nonpertanian Di Karesidenan Cirebon 1930-1930," in *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 2000, hlm 171.

bekerja di perusahaan swasta bisa mendapatkan upah 20 kali upah yang diterima para kuli atau buruh. Untuk lebih jelasnya sudah tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Upah Tenaga Kerja perbulan di Kabupaten Majalengka dari Tahun 1904-1919

Tahun	Mandor Pada Perusahaan Swasta	Kuli Di Perusahaan Swasta	Kuli Di Jalur Kereta Api	Kuli Di orang Pribumi/Non-Pribumi	Tukang batu biasa, tukang kayu dan pandai besi
1904	<i>f</i> 20 - <i>f</i> 25	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,20	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,66
1905	<i>f</i> 7,50 - <i>f</i> 25	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,22 - <i>f</i> 0,67
1906	<i>f</i> 7,50 - <i>f</i> 25	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,70
1907	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 35	<i>f</i> 0,14 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1908	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 35	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1909	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 35	<i>f</i> 0,14 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1910	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,14 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1911	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1912	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1913	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,30 - <i>f</i> 1
1914	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25
1915	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,40	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25
1916	<i>f</i> 6 - <i>f</i> 45	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,25
1917	<i>f</i> 7,50 - <i>f</i> 75	<i>f</i> 0,15 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,75
1918	<i>f</i> 7,50 - <i>f</i> 75	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,35	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,20 - <i>f</i> 0,25	<i>f</i> 0,40 - <i>f</i> 1,50
1919	<i>f</i> 7,50 - <i>f</i> 75	<i>f</i> 0,30 - <i>f</i> 0,35	<i>f</i> 0,25 - <i>f</i> 0,50	<i>f</i> 0,30 - <i>f</i> 0,30	<i>f</i> 0,75 - <i>f</i> 1

Sumber: Diolah dari *Koloniaal Verslag*.⁵⁷

Upah tenaga kerja selama 15 tahun dari tahun 1904 sampai 1919 tidak ada peningkatan upah yang signifikan. Kenaikan upah di Kabupaten Majalengka tidak sampai *f* 1 selama 15 tahun untuk para pekerja kasar atau serabut yang bekerja menjadi kuli atau buruh di perusahaan, kereta api dan individu serta para pengrajin. Hal ini berbeda dengan para pekerja yang menjadi mandor di perusahaan swasta, mereka mendapatkan kenaikan upah dua kali lipat dari tahun 1904 ke 1919. Masalah upah yang sangat rendah untuk para pekerja kasar menyebabkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Majalengka sangat rendah.⁵⁸



Gambar 3.4 Gambaran pekerja pribumi yang menjadi kuli di pabrik gula Kadipaten

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/931332>

⁵⁷ *Koloniaal Verslag Van [Nederlandsch (Oost-) Indie* berbagai tahun. *Koloniaal Verslag Van 1919 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage N*, 1919.

⁵⁸ *Koloniaal Verslag Van 1909 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage KK*.

Upah para pekerja yang bekerja di kuli di perusahaan swasta, kereta api, orang pribumi atau non-pribumi serta para Tukang batu biasa, tukang kayu dan pandai besi yang mendapatkan upah di bawah 1 gulden perbulan sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Upah yang diterima para pekerja tersebut karena harga bahan pokok yang sangat mahal pada periode tahun tersebut. Untuk gambaran harga beras per-pikul di jual dengan harga 10 gulden. Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di tahun 1914 dampak dari perang dunia pertama, harga bahan pokok dampak dari perang dunia pertama menyebabkan harga beras di Hindia-Belanda naik sekitar 50% perpikul dari 10 gulden menjadi 15 gulden.⁵⁹ Kenaikan harga beras dan harga bahan pokok berbanding terbalik dengan upah yang diterima para pekerja kuli tersebut. Selama 2 tahun dari tahun 1914-1916 tidak ada kenaikan upah yang diterima para pekerja, bahkan untuk upah termahal di hapuskan dan hanya sebesar *f* 0,25, berbeda dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya yaitu 1913 dan 1917 yang ada batasan atas upah yang diterima pekerja sebesar *f*0,75.⁶⁰

Upah para mandor yang bekerja di perusahaan swasta secara hanya melihat data sekilas memang lebih tinggi dari para yang bekerja sebagai kuli. Akan tetapi para mandor yang di gaji di rentang terendah yaitu 6 gulden, berpengaruh terhadap kehidupan kesejahteraan keluarga mereka. Karena sangat mahal nya harga bahan pokok seperti beras di wilayah Hindia-Belanda. Hal tersebut di perparah dengan kenaikan harga bahan pokok.

⁵⁹ Liem Thian Joe, *Riwajat Semarang 1416-1931*. Semarang – Batavia: Boekhandel Ho Kim Yo, 1933, hlm 220.

⁶⁰ *Koloniaal Verslag Van 1920 [Nederlandesch (Oost-) Indie. Bijlage GG*.

3.3 Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Kemiskinan bukan sekedar berpatok pada dimensi standarisasi seseorang memenuhi hidup yang layak yang bersinggungan dengan pendapatan, gizi dan modal. Akan tetapi, menurut Menurut Andre Bayo Ala, dalam bukunya yang menjelaskan bahwa kemiskinan juga menyangkut aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan pekerjaan. Kemiskinan bukan hanya diakibatkan oleh sistem ekonomi, akan tetapi Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya.⁶¹

Kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Majalengka tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan proses dan amat panjang yang melibatkan berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan masa lalu pemerintah Hindia-Belanda. Seperti pengaruh undang-undang agraria 1870, yang menyebabkan banyak masuknya pemodal-pemodal dari Eropa untuk melakukan investasi di Kabupaten Majalengka di perkebunan dan pabrik gula.⁶²

Kebijakan tersebut menyebabkan berkurangnya hasil panen padi masyarakat Kabupaten Majalengka. Hal ini diakibatkan kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang mengharuskan tanah yang sangat bagus untuk ditanami padi akan tetapi ketika diberlakukannya undang-undang agraria 1870 tanah tersebut harus digunakan untuk perkebunan tebu. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya

⁶¹ Andre Bayo Ala, *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm 2.

⁶² Jayanto, "Industri Gula Di Karesidenan Cirebon Tahun 1870-1930 Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2016): 1–15, hlm 10.

hasil panen padi petani karena yang biasanya panen padi dilakukan sebanyak dua kali setahun sejak kebijakan tersebut hanya menjadi satu kali.

Sistem pertanian tradisional dan belum adanya kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang memperhatikan masyarakat pribumi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Pertanian masyarakat Kabupaten Majalengka yang belum memiliki sistem irigasi yang memadai memberikan andil terhadap hasil panen petani. Gagal panen akibat cuaca dan wabah tikus yang melanda wilayah Kabupaten Majalengka menyebabkan terjadinya kelaparan dan kekosongan pasokan makanan masyarakat Kabupaten Majalengka. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gizi buruk di wilayah Kabupaten Majalengka, hal ini sama seperti di kawasan Karesidenan Cirebon.⁶³

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang rendah di Kabupaten Majalengka tergambar dalam laporan penelitian tentang keadaan ekonomi dan sosial di Jawa dan Madura. Pada tahun 1900 an adanya laporan tentang prostitusi di Kabupaten Majalengka. Prostitusi di Kabupaten Majalengka dipengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Faktor lainnya adalah berkembangnya Kabupaten Majalengka yang memiliki pabrik dan perkebunan sehingga banyaknya pekerja (buruh) yang datang dari daerah lain, hal ini ada hubungan kebutuhan biologis para buruh dari daerah lain dan kebutuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka sehingga permasalahan tersebut menyebabkan prostitusi di Kabupaten Majalengka.

⁶³ Imas Emalia, *Wabah Penyakit Di Cirebon 1906-1940*. Yogyakarta: Ombak, 2020, hlm 81.

Bertambahnya kemiskinan di Kabupaten Majalengka, paling banyak di dominasi oleh para petani. Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh krisis gula pada akhir abad ke-19 dan persaingan harga dan kualitas komoditas ekspor ke Eropa dengan negara lain seperti India. Pada awal abad ke-20 negara lain sudah melakukan modernisasi perkebunan, alat-alat pertanian dan pabrik-pabrik. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di awal abad ke-20 merupakan faktor selanjutnya atas peningkatan kemiskinan, hal tersebut karena menipisnya lapangan pekerjaan.⁶⁴

Sistem sewa tanah yang diberlakukan di wilayah Kabupaten Majalengka menyebabkan penduduk pribumi kalah saing oleh para pemodal Eropa yang datang berinvestasi di wilayah Kabupaten Majalengka. Harga beli hasil panen tebu, padi, teh dan kopi yang dihasilkan para petani sangat murah, tidak mencukupi kehidupan dan modal bertani di musim berikutnya. Keadaan tersebut memaksakan para masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk berhutang ke orang-orang Cina. Dari tahun 1866 di Keresidenan Cirebon sudah *berdiri De Javasch Bank Agentschap Cirebon*,⁶⁵ dan pada tahun 1910 mulai di buka cabang di wilayah Kabupaten Majalengka akan tetapi masih banyak penduduk yang belum mengenal sistem perbankan atau tidak memiliki cukup akses untuk menggunakan jasa perbankan.⁶⁶

Ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Majalengka mengenai sistem Bank dan tidak ada jaminan yang diberikan ke Bank memaksakan untuk berhutang ke

⁶⁴ Manggistan, "Produksi Padi Di Jawa Yang Tidak Mencukupi," in *Budidaya Padi Di Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia - Gramedia, 1986, hlm 119.

⁶⁵ Abdul Wahid et al., *Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia Dan Perkembangan Ekonomi Cirebon*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2022, hlm 3.

⁶⁶ *Staatsblad*, 1910, No. 298.

orang Cina. Hutang ke orang Cina ini seperti rentenir di masa sekarang, mereka berhutang ke orang Cina saat bertransaksi di pasar ataupun ketika panen atau musim tanam. Meskipun berhutang ke orang Cina sangat memberatkan mereka karena jumlah bunganya sangat besar yaitu sebesar 10% perbulan. Keadaan ini berdampak terhadap harga jual hasil pertanian masyarakat pribumi dan harus menjual ke tengkulak orang cina dengan harga murah. Bunga yang besar untuk membayar hutang ke orang Cina dan harga jual yang sangat rendah menyebabkan kemiskinan masyarakat Kabupaten Majalengka semakin meningkat.⁶⁷

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Majalengka bukan hanya di sebabkan oleh faktor pertanian yang terganggu dan gagal panen semata serta dibelinya hasil panen oleh pemerintah dan tengkulak. Kemiskinan terjadi di Kabupaten Majalengka disebabkan oleh sangat rendahnya upah yang diterima oleh para pekerja seperti kuli di perusahaan dan pekerja sebagai pengrajin. Rendahnya upah yang diterima dan mahalnya harga bahan pokok pada periode tahun 1900-1922 merupakan masalah yang di hadapi masyarakat Kabupaten Majalengka. Ketika tahun 1914 terjadi kenaikan harga bahan pokok di Hindia-Belanda, menyebabkan semakin tinggi tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Hal tersebut tidak adanya kenaikan upah yang diterima para pekerja ataupun harga beli hasil pertanian.

Faktor lain dari kemiskinan yang terjadi adalah disebabkan oleh kebijakan politik ekonomi Pemerintah Hinda-Belanda. Atas kebijakan tersebut masyarakat

⁶⁷ Mindere Welvaart Commisie, *Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera, Samentrekking Van De Afdeulingsverslagen Over De Uitkomsten Der Onderzoekingen Naar De Economie Van De Desa In De Residentie Cheribon*. Weltevreden: F. B. SMITS, 1907, hlm 50.

kabupaten Majalengka tidak bisa memiliki atas hak pengolahan tanah dan hasil produksi. Pemerintah membuat kebijakan hanya untuk mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Majalengka. Dan hanya menguntungkan Pemerintah Hindia-Belanda, investor dan masyarakat etnis Cina.

3.4 Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Sosial bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan manusia atau dengan kelompok, akan tetapi sosial juga menyangkut semua lini kehidupan manusia. Kesejahteraan Sosial bukan hanya sekedar kemiskinan dan kesejahteraan manusia secara materil tetapi menyangkut bagaimana kehidupan pendukung manusia itu, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan pada wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia yang masih terbatas, Pendidikan akan melahirkan insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses transformasi sosial di dalam masyarakat di masa yang mendatang. Salah satu faktor dari percepatan mobilitas vertikal dan horizontal masyarakat adalah pendidikan, pendidikan menjadi faktor determinan sehingga terjadinya pembentukan struktur masyarakat yang baru. Struktur masyarakat yang baru ini adalah lapisan masyarakat yang terdidik, yang menjadi faktor perekat unit-unit sosial di masyarakat.⁶⁸

Awal abad ke-20 ketika Politik Etis diberlakukan di Hindia-Belanda oleh pemerintah kerajaan Belanda dengan membawa tiga ide dasar yaitu Pendidikan, perpindahan Penduduk dan pengairan. Pada bidang pendidikan pemerintah Hindia-Belanda mulai menjalankan dengan membangun sekolah-sekolah di setiap

⁶⁸ Zaimudin, "Pendidikan Islam Sebagai Saluran Mobilitas Sosial," *Sosio-Didaktika - Social Science Education Journal* 4, no. 2 (2017): 87–99, hlm 90-91.

Kabupaten atau wilayah. Meskipun pada bidang pendidikan Politik Etis untuk mewujudkan kecerdasan pribumi di tanah jajahan Hindia-Belanda. Akan tetapi pada prakteknya sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah Hindia-Belanda ditunjukkan untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil tetapi murah.⁶⁹

Kabupaten Majalengka ketika abad ke-20 diberlakukannya Politik Etis, dalam bidang pendidikan mulai dibangun sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Majalengka. Pertumbuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Majalengka di akibatkan dari dampak perkebunan dan pabrik gula yang semakin berkembang serta adanya jalur kereta api ke wilayah Cirebon. Hal tersebut mendorong pemerintah Hindia-Belanda untuk membangun fasilitas pendidikan untuk memenuhi dan mendapatkan tenaga kerja yang ahli di bidang administrasi dan tenaga ahli lainnya dengan upah yang murah.

Pembangunan sekolah-sekolah (Sekolah desa, sekolah rakyat) di Kabupaten Majalengka di bangun ketika tahun 1902 yaitu pada masa pemerintahan bupati R. A. A. Aria Sasra Ningrat periode tahun 1902-1922. Meskipun begitu perkembangan pendidikan sekolah non-formal sudah ada di Kabupaten Majalengka sejak tahun 1864, sekolah tersebut dikenal dengan seperti madrasah. Pada tahun 1920 an pemerintah Hindia-Belanda menetapkan melalui almanak bahwa pekerjaan dan pangkat yang dapat dipegang atau dicapai oleh pribumi haruslah memiliki pendidikan dasar. Sekolah di Hindia Belanda terbagi menjadi dua macam yaitu sekolah umum dan sekolah calon. Sekolah umum ini mengajarkan tentang ilmu-

⁶⁹ Yadi Kusmayadi, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942," *Jurnal Artefak: History and Education* 4, no. 2 (2018): 141–152, hlm 143-145.

ilmu untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan untuk memegang pekerjaan yang mudah serta sekolah ini ada macam yaitu sekolah pribumi dan sekolah bangsa eropa. Sedangkan sekolah calon adalah sekolah yang ditetapkan untuk memberikan ilmu berfokus pada satu bidang ilmu keahlian.⁷⁰

Sekolah umum ini terdiri dari delapan jenis yaitu, sekolah rakyat yang diajarkan pada sekolah ini hanyalah baca, tulis dan berhitung yang diajarkan di desa. Kedua ada sekolah *gubernemen* kelas II sama seperti sekolah rakyat untuk golongan pribumi yang berbedanya terletak pada cara pengajarannya lebih tinggi dan dilakukan oleh gubernemen. Kemudian ada sekolah *Hollandsch Inlandsch School* (HIS), selanjutnya ada sekolah untuk orang Cina yaitu *Hollandsch Chinnesse School* (HCS). Selanjutnya ada sekolah Belanda seperti DHS dan KWS, kemudian ada *Meer Uitgerbreid Lager Onderwijs* (MULO), Sekolah Partikelir dan *Hoogere Burgerschool* (HBS). Kemudian untuk sekolah calon yaitu; pertama *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) Sekolah ini di peruntukan untuk anak-anak bangsawan yang akan dijadikan pegawai pemerintah, kedua ada *Bestuursschool* (sekolah bistir) yang terletak di Betawi/ Jakarta, ketiga ada *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah raja) dan keempat *Normaalscholen voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah normal) dan lain sebagainya.⁷¹

Sekolah di Kabupaten Majalengka jumlahnya sangat lah tidak banyak berbeda dengan daerah yang di bawah keresidenan Cirebon seperti Kabupaten Indramayu.

⁷⁰ N. Kartika, *op.cit*, hlm 91-92.

⁷¹ Sawa Suryana, "Pendidikan Masa Kolonial," in *Indonesia Belajarlah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007, hlm 195-197.

Kabupaten Majalengka hanya memiliki satu sekolah *Hollandsch Inlandsch School* (HIS) dan untuk sekolah pribumi atau sekolah rakyat di Kabupaten Majalengka terdapat 13 sekolah rakyat.⁷² Kemudian di Kabupaten Majalengka memiliki sekolah Partikelir yang di kelola oleh misionaris J. Verhoeven terletak di wilayah Cideres.



Gambar 3.5 Lingkungan Rumah J. Verhoeven dan Sekolahnya.

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/928742>

Sekolah Partikelir yang didirikan oleh misionaris J. Verhoeven pertama kali dibangun sekolahnya pada tahun 1904 dan pembangunan sekolah tersebut selesai setelah satu tahun pembangunan.⁷³ Sekolah yang di kelola oleh misionaris J. Verhoeven ini mendapatkan dana Hibah dari pemerintah Hindia-Belanda untuk menunjang pengelolaan sekolahnya. Untuk dana Hibah yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda berikan ke sekolah yang dikelola oleh misionaris J. Verhoeven, tercantum pada tabel berikut ini:

⁷² A. Sobana Hardjasaputra et al., *Cirebon: Dalam Lima Zaman (Abad Ke-15 Hingga Pertengahan Abad Ke-20)*. Bandung: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011, hlm 177.

⁷³ N. Kartika, *op. cit*, hlm72.

Tabel 3.7 Jumlah Dana Hibah Pemerintah Hindia-Belanda ke Sekolah Misionaris J. Verhoeven

No	Tahun	Jumlah Dan Hibah Yang Diberikan
1	1910	f 160
2	1911	f 160
3	1912	f 160
4	1913	f 250
5	1914	f 265
6	1915	f 265
7	1916	f 335
8	1917	f 335
9	1918	f 335
10	1919	f 335

Sumber: Diolah dari Koloniaal Verslag Van [Nederlandsch (Oost-) Indie berbagai tahun.

Dana Hibah yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda diberikan satu tahun sekali, penulis hanya menemukan data Hibah yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada sekolah yang dikelola oleh misionaris J. Verhoeven dari tahun 1910 sampai 1919 berdasarkan dari *Koloniaal Verslage*. Dana Hibah yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda terus mengalami peningkatan setiap tiga tahun sekali dari f 160 pada tahun 1910 dan meningkat pada tahun 1919 sebesar f 335.⁷⁴ Dana Hibah tersebut dipergunakan untuk keperluan pengelolaan sekolah seperti renovasi dan biaya upah untuk staf pengajar. Dana Hibah tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan sekolah-sekolah partikelir yang ada di wilayah Keresidenan Cirebon yang rata-rata mendapatkan dan Hibah sekitar f 300 sejak tahun 1910 dan terus mengalami peningkatan.

⁷⁴ *Koloniaal Verslag Van 1919 [Nederlandsch (Oost-) Indie. Bijlage N.*

Sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka langsung di awasi oleh bupati Kabupaten Majalengka. Dalam perkembangannya sekolah di Kabupaten Majalengka meningkatnya jumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka pada tahun 1922 berjumlah 66 sekolah.⁷⁵ Untuk jumlah murid sekolah yang ada di Kabupaten Majalengka pada tahun 1922, akan peneliti sajikan menjadi dua tabel yaitu sekolah rendah dan sekolah desa;

Tabel 3.8 Jumlah Murid Sekolah Rendah tahun 1922 di Karesidenan

Cirebon

Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cirebon	3.353	256	3.611
Indramayu	1.954	161	2.115
Kuningan	1.477	191	1.668
Majalengka	1.475	136	1.611
TOTAL	8.259	746	9.005

Sumber: Diolah dari Hardjasaputra dkk.⁷⁶

Tabel 3.9 Jumlah Murid Sekolah Desa tahun 1922 di Karesidenan Cirebon

Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cirebon	9.741	1.156	10.897
Indramayu	2.488	209	2.657
Kuningan	5.023	1.016	6.039
Majalengka	3.874	637	4.511
TOTAL	21.126	3.018	24.104

Sumber: Diolah dari Hardjasaputra dkk.⁷⁷

Jumlah murid sekolah di Kabupaten Majalengka yang terbilang sedikit diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang ada, seperti masalah dalam bahasa. Masalah bahasa adalah akibat dari pengajar-pengajar yang datang dari luar daerah Majalengka datang menggunakan bahasa melayu, sedangkan penduduk di

⁷⁵ Hardjasaputra et al., *op.cit*, hlm 178.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 178.

⁷⁷ *Ibid*.

Kabupaten Majalengka menggunakan bahasa Sunda dan Jawa. Masalah yang menjadi minat orang tua di Kabupaten Majalengka adalah faktor orang tua di Kabupaten Majalengka masih rendah akan kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya. Orang tua di Kabupaten Majalengka lebih suka anak-anak mereka tinggal di rumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan ikut bertani. Faktor lainnya adalah faktor biaya dan hak untuk bersekolah, di Kabupaten Majalengka yang menyekolahkan anak-anaknya adalah mereka yang memiliki jabatan di pemerintahan dan orang yang kaya di desa.

Rendahnya minat dalam bidang di Kabupaten Majalengka memberikan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Terbukanya lapangan pekerjaan yang luas di Kabupaten Majalengka yang mengklasifikasikan orang yang memiliki klasifikasi dan pernah bersekolah, menyebabkan tidak bisanya masyarakat Kabupaten Majalengka untuk bekerja di perusahaan swasta dan pemerintahan. Sehingga perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi di Kabupaten Majalengka pada tahun 1901-1922 hanya di nikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

3.5 Lahirnya Gerakan Pembaharuan di Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Politik Etis tidak hanya berdampak pada bidang irigasi, perpindahan penduduk dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan Politik Etis tidak hanya berdampak terhadap bertambahnya kepintaran atau kecerdasan golongan pribumi dan mendapatkan pekerjaan dalam bidang administrasi atau pekerjaan lain sesuai ilmu yang di dapat dari sekolahnya. Politik Etis dalam dunia pendidikan berdampak

terhadap lahirnya golongan-golongan baru kaum intelektual di struktur sosial masyarakat. Kaum intelektual yang lahir karena Politik Etis ini menyebabkan lahirnya gerakan sosial dan perubahan di masyarakat, gerakan tersebut adalah dikenal dengan pergerakan nasional.

Pergerakan nasional merupakan sebuah era di mana munculnya ide-ide nasionalisme dan istilah untuk menggambarkan sejarah peristiwa-peristiwa dalam rangkaian para kaum intelektual berjuang melepaskan diri dari belenggu tangan penjajahan untuk bisa mencapai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan nasional merupakan gerakan yang mencakup berbagai bidang seperti gerakan ekonomi, sosial, Politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.⁷⁸

Politik Etis tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pergerakan nasional, Politik Etis khususnya dalam bidang pendidikan melahirkan kaum-kaum intelektual yang melahirkan gerakan tersebut. Banyak sekolah-sekolah di setiap daerah, sehingga adanya pemerataan pendidikan yang pada saat itu pendidikan merupakan barang yang langka di tanah Hindia-Belanda. Sehingga pendidikan yang dirasakan masyarakat menciptakan masyarakat yang maju dan lahirnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional mendorong kaum intelektual dan terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan, baik yang berasaskan Politik maupun sosial budaya.

Pergerakan nasional di Indonesia merupakan sebuah gerakan yang lahir tanpa di sengaja. Pergerakan Nasional lahir dari akibat proses perjuangan yang panjang,

⁷⁸ Yusuf Perdana And Rinaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2022, hlm 5.

dan dapat pengaruh eksternal dan internal. Pergerakan nasional diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang diinisiasi oleh para siswa dari Stovia (Sekolah Dokter Pribumi). Dari lahirnya organisasi Budi Utomo ini menyebabkan lahirnya organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Sarekat Islam dan lainnya serta organisasi di daerah-daerah.⁷⁹

Pergerakan Nasional dan kesadaran pembaharuan di Kabupaten Majalengka dimulai oleh K. H. Abdul Halim setelah pulang dari Mekkah. Setelah kembalinya ke Majalengka, melihat pergerakan nasional mulai tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut menyebabkan K. H. Abdul Halim untuk ikut dalam gemuruh perjuangan bangsa. K. H. Abdul Halim memikirkan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka yang sangat tidak sejahtera dan ingin merubah serta memperbaiki keadaan tersebut.

Pada awalnya K. H. Abdul Halim hanya melaksanakan dakwah dengan mengadakan pengajian kecil-kecil di rumahnya. Pengajian tersebut hanya diikuti sedikit masyarakat, akan tetapi tidak menyurutkan K. H. Abdul Halim untuk terus berbagi ilmunya. Seiring berjalannya waktu, K. H. Abdul Halim memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya yang termarginalkan disebabkan oleh ketidakadilan Politik ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Keadaan tersebut adanya ketimpangan pribumi yang hidup di bawah garis kemiskinan berbeda dengan golongan Eropa dan Cina, hal ini akibat dari kebijakan Politik Hindia-Belanda yang lebih menguntungkan Cina. Perdagangan di Hindia-

⁷⁹ Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Makasar: Rayhan Intermedia, 2015, hlm 4.

Belanda di kuasi oleh orang Cina, padahal barang tersebut didapatkan dari golongan pribumi.⁸⁰

Melihat keadaan tersebut menggerakkan K. H. Abdul Halim untuk mengubah keadaan masyarakat tersebut, yaitu dengan mendirikan Hayatul Qulub (yang berarti Kehidupan Hati) pada tahun 1912, Hayatul Qulub ini membangun dan membina semangat saling membantu di antara para pedagang muslim di Kabupaten Majalengka. Aktivitas organisasi ini seperti simpan pinjam pedagang dan di luar kegiatan ekonomi juga melaksanakan pendidikan serta pengajian, Hayatul Qulub dengan cepat mampu mengumpulkan 60 anggotanya.⁸¹ Pembinaan dari organisasi Hayatul Qulub merubah keadaan pedagang pribumi, dari ilmu pembinaan yang diterima dari organisasi Hayatul Qulub pedagang pribumi mampu bersaing dengan perdagangan Cina. Kemajuan para pedagang pribumi menyebabkan adanya rasa ketidaksukaan pedagang Cina. Sehingga terjadilah konflik antara pedagang Cina dengan pribumi.

Konflik tersebut pemerintah Hindia-Belanda justru mengkambing hitamkan Hayatul Qulub atas terjadinya konflik tersebut. Sehingga pada tahun 1915 organisasi Hayatul Qulub dibubarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda.⁸² Meskipun organisasi Hayatul Qulub dibubarkan, K. H. Abdul Halim terus bergerak tanpa organisasi akan tetapi dengan cara personal. Dan untuk kegiatan pendidikan seperti

⁸⁰ N. Kartika, *op.cit*, hlm 97.

⁸¹ Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K. H Abdul Halim*. Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008, hlm 32.

⁸² Wildan Imaduddin Muhammad, "Ormas Islam Di Jawa Barat Dan Pergerakannya; Studi Kasus Persis Dan PUI," *Analisis*, Vol 16, No. 2, 2016: 75–98, hlm 91 Wildan Imaduddin Muhammad, "Ormas Islam Di Jawa Barat Dan Pergerakannya; Studi Kasus Persis Dan PUI," *Analisis* 16, no. 2 (2016): 75–98.

pengajian dipindahkan melalui Majelis Ilmi. Majelis Ilmi ini menggelar pengajian dengan mengajarkan anak-anak remaja tentang Al-Quran.

Berjalannya Majelis Ilmi selama 4 tahun, adanya keinginan K. H. Abdul Halim untuk menjadikan Majelis Ilmi sebagai lembaga pendidikan Modern. Hal tersebut karena keyakinan K. H. Abdul Halim aspek pendidikan merupakan aspek yang utama dan harus di perhatikan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari para pemuka agama Islam lainnya di Kabupaten Majalengka. Tentang pembaharuan sistem pendidikan di Kabupaten Majalengka. Sehingga terjadilah pertemuan di rumah mertuanya yaitu K. H. Moh. Ilyas yang sekaligus Hoofdpenghulu Landraad Majalengka. Pertemuan tersebut di hadiri oleh H. Abdul Halim, K. H. Djubaedi, K. H. Mas Hidayat, Mas Setya Sentana, Habib Abdullah Al-Djufri, R. Sastrakusuma, dan R. Acung Sahlan.⁸³

Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruangan Kantor Penghulu Landraad Kabupaten Majalengka. Pertemuan tersebut untuk membicarakan rencana transformasi pendidikan di Kabupaten Majalengka. Hasil dari Pertemuan tersebut adalah mendirikan sebuah organisasi yang akan mengelola lembaga pendidikan di Kabupaten Majalengka. Organisasi yang akan didirikan akan berbentuk perkumpulan (jum'iyah) yang bermaksud memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pertemuan tersebut kemudian sepakat untuk menamakan perkumpulan tersebut dengan nama Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin (Perkumpulan Pertolongan Untuk Pelajar), atas bantuan sang mertua, dibangunlah sebuah moshola dan tiga buah bangunan untuk madrasah.

⁸³ Falah, *op.cit.*, hlm 36-37.

Di tempat tersebutlah dari tahun 16 Mei 1916 proses pembelajaran dilaksanakan oleh K. H. Abdul Halim dan teman-temannya di bawah naungan Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin.⁸⁴ Majlisul Ilmi yang telah memiliki tujuh orang memindahkan pusat kegiatan belajarnya ke gedung madrasah Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin. Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin terus berkembang di Kabupaten Majalengka dalam memberikan pendidikan untuk masyarakat. Meskipun dalam perjalanannya adanya penolak dari sebagian pemuka agam di Kabupaten Majalengka, akibat dari keinginan K. H. Abdul Halim untuk menerapkan sistem kelas dalam pendidikan di madrasah Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin. Meskipun begitu hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus melakukan gerakan pembaharuan di Kabupaten Majalengka melalui bidang pendidikan.

Dengan bergabungnya K. H. Abdul Halim di organisasi Sarekat Islam, memberikan perkembangan terhadap Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin. Atas saran tokoh utama Sarekat Islam yaitu H. Oemar Said Tjokroaminoto, untuk mendorong K. H. Abdul Halim untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia-Belanda untuk mengakui secara hukum keberadaan Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin di Kabupaten Majalengka. Pengajuan tersebut teralisasi setelah Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin berganti nama menjadi Persjarikatan Oelama (PO) sekitar pertengahan tahun 1917. Sehingga pada tanggal 21 Desember 1917 Rechtspersoon (pengesahan pemerintah) No. 43 dari Gubernur Jenderal J. P. Graaf van Limburg Stirum, pemerintah Hindia-Belanda mengakui keberadaan Persjarikatan Oelama sebagai organisasi meskipun cakupannya hanya di wilayah

⁸⁴ *Ibid.*

Kabupaten Majalengka. Sehingga atas pengakuan dari Pemerintah Hindia-Belanda, Persjarikatan Oelama berkembang pesat di wilayah Kabupaten Majalengka dengan mendirikan cabang-cabang di berbagai wilayah Kabupaten Majalengka.⁸⁵

Munculnya gerakan pembaharuan di Kabupaten Majalengka ini merupakan suatu respon dari adanya konflik sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Menurut Dahrendorf yang menyatakan, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Konflik yang terjadi di Kabupaten Majalengka merupakan akibat dari relasi sosial dalam sistem yang terbangun di wilayah Kabupaten Majalengka. Sistem-sistem sosial dan ekonomi yang membedakan golongan berdasarkan bangsa yaitu Pribumi, Cina dan Eropa, mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat Kabupaten Majalengka.

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang hanya mementingkan suatu golongan tertentu, menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang rasis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sistem yang hanya menguntungkan golongan orang eropa dan cina. Golongan pribumi yang tidak tersejahterakan oleh sistem yang berjalan. Oleh karena itu, melihat keadaan masyarakat yang terbelakang dalam bidang sosial dan ekonomi. Abdul Halim melahirkan gerakan pembaharuan di Kabupaten Majalengka melalui organisasi PUI.

⁸⁵ Nina Herlina Lubis et al., *Sejarah Perkembangan Islam Di Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2011, hlm 274.